

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengendalian pembangunan proyek IPAL Kota Jambi yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi, dapat diketahui bahwa proses pengendalian yang dilakukan telah menunjukkan upaya ke arah pelaksanaan fungsi manajerial sesuai dengan tahapan pengendalian menurut Robbins dan Coulter, yaitu: penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan hasil aktual dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif. Pada indikator penetapan standar, BPPW menggunakan Surat Edaran DJCK No. 8 Tahun 2022 sebagai dasar regulatif, namun belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang spesifik untuk proyek IPAL. Hal ini membuat standar operasional bersifat umum dan kurang adaptif terhadap kondisi proyek di Kota Jambi.

Kemudian, dalam indikator pengukuran kinerja, BPPW telah melakukan pelaporan secara berkala dan melibatkan tim pengawas. Namun, indikator kinerja belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dan terukur, sehingga pengukuran cenderung bersifat administratif. Pada tahapan indikator perbandingan dilakukan evaluasi melalui rapat teknis dan laporan lapangan. Namun, karena belum ada SOP rinci dan indikator kinerja yang baku, proses perbandingan ini masih bergantung pada interpretasi subjektif yang tidak sepenuhnya berbasis indikator kuantitatif yang terukur. Sementara itu, tindakan korektif yang telah

dilakukan BPPW setiap ditemukan deviasi hanya bersifat responsif, bukan preventif, karena tidak didasari oleh sistem evaluasi yang kuat sejak awal. Maka dari hasil penelitian meskipun dilakukan pengendalian oleh BPPW sudah berjalan secara fungsional dan mengikuti struktur umum pengendalian manajemen, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Ketiadaan SOP internal, kurangnya sistem pemantauan berbasis data real-time, serta minimnya pelibatan masyarakat menjadi kelemahan yang perlu dibenahi. Pengendalian proyek seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, fleksibel, dan kontekstual terhadap tantangan lokal di lapangan.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian proyek IPAL oleh BPPW belum sepenuhnya sesuai dengan teori pengendalian Robbins dan Coulter secara menyeluruh, khususnya dalam aspek struktur sistematis dan penguatan evaluasi berbasis indikator kinerja. Maka diperlukan penyempurnaan sebagai bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan solusi. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengembangan SOP teknis internal, sistem pemantauan yang lebih terukur, dan peningkatan komunikasi lintas sektor agar pengendalian proyek menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

4. 2. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pengendalian BPPW terhadap proyek IPAL di Kota Jambi, diperlukan masukan sebagai berikut:

1. BPPW perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kota Jambi, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam perkembangan yang terjadi pada proyek IPAL. Keterlibatan ini penting untuk memperkuat pengawasan bersama yang berdampak langsung terhadap kelancaran proyek di lapangan.
2. BPPW disarankan untuk tidak hanya mengandalkan laporan tertulis dan forum *weekly meeting*, diperlukan pengawasan langsung di lapangan secara berkala untuk memverifikasi progres dan menangani permasalahan secara langsung dan konkret.
3. BPPW perlu meningkatkan partisipasi publik dengan menyediakan forum aduan masyarakat secara terbuka dan responsif, agar warga terdampak proyek IPAL dapat menyampaikan keluhan atau saran yang akan dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut.